

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN (Studi Kasus: Desa Murung Sari dan Desa Mamar)

Akhmad Rizaldi<sup>1</sup>, Agus Surya Dharma<sup>2</sup>, Arif Budiman<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [icaldi2401@gmail.com](mailto:icaldi2401@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan program bantuan langsung tunai (BLT dana desa adalah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dana ini juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan penanganan penyakit kronis, serta untuk mengurangi indikator resiko kemiskinan di desa. Terdapat beberapa permasalahan dalam program bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa yang sudah berjalan cukup lama, antara lain sebagai berikut: Tidak maksimalnya dalam hal pemerataan sasaran yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) ini dapat disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu perbedaan kriteria penerima BLT antar desa dapat menyebabkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan; kurangnya pemahaman masyarakat, banyak warga desa yang kurang memahami mekanisme dan tujuan dari program BLT, hal ini juga berhubungan dengan adanya ketertinggalan komunikasi antar implementor dengan masyarakat; Keterlambatan penyaluran dana BLT dana desa kepada warga, yang disebabkan oleh lambatnya proses pelaporan data dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari aparat desa. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Serta metode dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Sepuluh informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menyediakan data. Kondensasi data dan menampilkan data, serta membuat kesimpulan dan memverifikasinya, merupakan bagian dari analisis data. Triangulasi, memeriksa atau menganalisis contoh-contoh negatif, menggunakan bahan referensi, melakukan *member check*, meningkatkan ketekunan, dan memperpanjang pengamatan adalah bagian dari uji kredibilitas.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program, Bantuan Langsung Tunai

### ABSTRACT

*The aim of the direct cash assistance program (Village Fund BLT) is to overcome extreme poverty and help poor people meet their daily living needs. These funds are also used for community empowerment activities, infrastructure development, and chronic disease management, as well as to reduce poverty risk indicators in villages. . There are several problems in the Village Fund direct cash assistance (BLT) program which has been running for quite a long time, including the following: The lack of optimal distribution of targets who are entitled to receive direct cash assistance (BLT) can be caused by one factor, namely differences. Criteria for BLT recipients between villages can cause internal inequality distribution of aid; lack of community understanding, many village residents do not understand the mechanisms and objectives of the BLT program, this is also related to delays in communication between implementers and the community; Accountability Report (LPJ) from village officials. The research methodology used in this research is descriptive-qualitative. As well as documentation, interviews and observation methods used to collect data. Ten informants were selected using purposive sampling techniques to provide data. Data condensation and displaying data, as well as drawing conclusions and verifying them, are part of data analysis. Triangulation, examining or analyzing negative examples, using reference materials, conducting member checks, increasing persistence, and extending observations are part of credibility testing.*

**Keyword:** Effectiveness, Program, Building a Toddler Family

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia, hal ini dikarenakan kondisi Indonesia yang masih memiliki beberapa aspek yang masih berstatus berkembang, salah satunya

yaitu masyarakat. Masyarakat Indonesia juga masih memiliki banyak permasalahan baik dalam sosial perkembangan, salah satunya yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang sudah lama terjadi di Indonesia, kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, kesempatan lapangan kerja yang kurang, pendapatan yang kurang hingga permasalahan politik yang kurang stabil.

Menurut data kemiskinan pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2023 tercatat 9,36% dari total jumlah penduduk Indonesia atau menurun pada tahun sebelumnya di angka 9,57% dari total penduduk. (sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) 2023*)

Pada awal tahun 2020 negara Indonesia terkena musibah yang sangat berbahaya dan mematikan yaitu adanya COVID-19 yang menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Dengan itu juga, penambahan jumlah penduduk miskin disebabkan karena kehilangan mata pencaharian sehingga membuat warga kehilangan pendapatan ekonomi. Selain itu, pendidikan yang rendah juga sebagai faktor yang membuat warga kesulitan dalam pencarian pekerjaan.

Dalam hal ini, pemberian bantuan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan lambat diterima oleh masyarakat yang terkena dampak, karena sistem regulasi pemberian bantuan dari berbagai pintu yang membuat jadwal dan perspektif yang berbeda serta terkadang data yang diberikan tidak valid. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak Corona virus, pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa Setempat.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berupa uang tunai kepada keluarga yang kurang mampu (miskin) yang bersumber dari dana desa untuk meminimalisir angka kemiskinan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp 300.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 1 tahun setiap bulannya sesuai dengan keputusan dari hasil rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Sumber: <https://digitaldesa.id/artikel/blt-dana-desa-2024-panduan-lengkap-untuk-mendapatkan-tunjangan-bulanan-rp-300-ribu>)

Dana BLT Dana Desa digunakan untuk memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga miskin di desa, dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dana ini juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan penanganan penyakit kronis, serta untuk mengurangi indikator resiko kemiskinan di desa.

Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemilihan penerima BLT Dana Desa ini yaitu:

- a. Keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang tidak tercatat (*exclusion error*).
- b. Tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Sembako.
- c. Terkena kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tiga bulan ke depan.
- d. Memiliki anggota keluarga yang rentan terkena penyakit kronis atau berkepanjangan
- e. Keluarga yang memiliki anggota yang merupakan lansia atau penyandang disabilitas yang tinggal sendiri.

f. Keluarga yang berstatus Janda (Cerai Mati)

Desa Murung Sari dan Desa Mamar memiliki gambaran yang berbeda dalam hal pekerjaan, pendapatan dan tingkat pendidikan. Desa Murung Sari memiliki masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pburuh harian lepas, dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sementara itu, Desa Mamar memiliki masyarakat yang lebih beragam dalam pekerjaan, dengan sebagian besar berprofesi sebagai petani dan peternak, serta tingkat pendapatan yang lebih stabil. Namun, tingkat pendidikan di Desa Mamar juga masih rendah, dengan sebagian besar penduduk tidak tamat SD. Kondisi ini mempengaruhi adanya program BLT Dana Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang membutuhkan.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif – kualitatif pada berdasarkan masalah yang dihadapi, yaitu suatu tipe penelitian yang sifatnya ingin menggambarkan secara rinci fakta, keadaan, variable dan fenomena yang ada di lapangan yang mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memilih 16 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Metode untuk memilih sumber data dengan tujuan tertentu disebut dengan *purposive sampling* (Sugiyono, 2023). Dengan menggunakan sesuai dengan teori menurut Jan Marce Dalam (Kadji 2015) yakni informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat dan pembagian potensi. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas data terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas menurut (Sugiyono, 2014:270) sehingga akan menghasilkan data yang akurat terkait tentang implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di Kecamatan Amuntai Selatan dengan studi kasus desa Murung Sari dan Desa Mamar.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Kecamatan Amuntai Selatan (Studi Kasus: Desa Murung Sari dan Desa Mamar)**

Implementasi adalah tindakan pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci. Menurut Afiful Ikhwan, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Implementasi mencakup aktivitas sistematis yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan melalui partisipasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

#### **1. Informasi**

Informasi adalah fakta yang sudah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi penerima.

##### **a. Sosialisasi**

Sosialisasi adalah proses di mana individu atau kelompok berinteraksi dan beradaptasi dengan norma, nilai, serta praktik sosial yang berlaku dalam suatu komunitas. Proses ini melibatkan penyampaian informasi, pembelajaran dan penguatan hubungan sosial yang bertujuan untuk membentuk kesadaran kolektif dan memperkuat kohesi sosial. Melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat mengembangkan rasa identitas bersama, memahami peran masing-masing dalam komunitas dan berkontribusi pada pembangunan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

Dari hasil wawancara dan observasi mengenai program Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Dana Desa di Desa Murung Sari dan Desa Mamar, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program ini belum efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, yang menunjukkan bahwa informasi mengenai program ini belum sepenuhnya menjangkau dan dipahami oleh warga desa.

b. **Transparansi Informasi**

Transparansi informasi berkaitan dengan struktur penyajian karena pada saat menyampaikan informasi harus menempatkan kalimat-kalimat penjelas dalam struktur tertentu agar memudahkan para pendengar dan pembaca dalam memahami dan mendengar informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Murung Sari masih kurang jelas. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait program ini, sehingga tidak ada pengumuman atau pemberitahuan resmi yang menjelaskan keberadaan dan pelaksanaan program BLT. Hal ini menghambat partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

2. **Isi Kebijakan**

Isi kebijakan merupakan indikator kedua yang mempengaruhi implementasi, digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan suatu program dalam implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa di Desa Murung Sari dan Desa Mamar Kecamatan Amuntai Selatan.

a. **Manfaat Yang Dihasilkan**

Manfaat yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau program sering kali mencakup peningkatan kualitas hidup, efisiensi dalam proses dan pengembangan keterampilan individu. Dengan adanya manfaat ini, masyarakat dapat merasakan dampak positif yang signifikan, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa manfaat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Murung Sari dan Desa Mamar masih kurang optimal. Masyarakat belum sepenuhnya memahami kebijakan dan pemanfaatan dana program ini. Hal ini mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih baik agar sasaran program dapat memahami dan memanfaatkan dana BLT secara efektif.

b. **Ketersediaan Kepentingan Yang Mempengaruhi Proses Implementasi**

Ketersediaan kepentingan merupakan faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan atau program. Ketika berbagai pihak, seperti pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan yang sejalan dan saling mendukung, proses implementasi dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan kepentingan atau konflik, hal ini dapat menghambat pelaksanaan dan mengurangi dampak positif yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kepentingan-kepentingan yang ada serta membangun komunikasi yang baik antar pihak terkait agar tujuan bersama dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Murung Sari dan Desa Mamar masih kurang memahami penggunaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kesenjangan informasi mengenai tujuan dan mekanisme penyaluran dana mengakibatkan penerima manfaat tidak sepenuhnya

mengerti cara memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan dasar, seperti sandang dan pangan, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

### 3. Dukungan Masyarakat

Dukungan adalah salah satu upaya diberikan kepada seseorang baik itu moril ataupun material untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program. Pelaksanaan suatu program akan sangat sulit apabila pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan program tersebut.

#### a. Kesiadaan Pada Komitmen Pelaksana

Kesiadaan pada komitmen pelaksana merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu program, termasuk dalam konteks pemahaman tujuan dan mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa. Komitmen pelaksana, yang mencakup pemerintah desa, relawan, dan pihak terkait lainnya, sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah dalam proses penyaluran dan penggunaan dana dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami tujuan dan mekanisme program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Banyak responden mengungkapkan kebingungan terkait kriteria penerima dan penggunaan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketidaktepatan informasi ini berpotensi menghambat efektivitas program, karena masyarakat tidak sepenuhnya menyadari manfaat yang dapat diperoleh dari bantuan tersebut, sehingga tujuan program tidak dapat tercapai secara optimal.

#### b. Kepatuhan Pada Sikap Responsif Terhadap Masukan

Kepatuhan pada sikap responsif terhadap masukan dalam implementasi program BLT dana desa sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan bantuan tersebut. Responsif terhadap masukan dari masyarakat memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih mendalam. Dengan mendengarkan masukan tersebut, program BLT dapat disesuaikan agar lebih relevan dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh penerima.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kepatuhan pemerintah desa dalam bersikap responsif terhadap masukan masyarakat masih kurang. Hal ini disebabkan oleh minimnya interaksi antara pemerintah desa dan warga. Akibatnya, banyak masukan yang seharusnya diterima dan dipertimbangkan tidak sampai ke pihak pengambil keputusan, sehingga potensi perbaikan dalam pelayanan dan program desa tidak dapat terwujud secara optimal.

### 4. Pembagian Potensi

Sebab-sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu program yang ditentukan oleh aspek pembagian potensi antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan pembagian tugas atau wewenang pelaksana.

#### a. Kejelasan Dalam Pembagian Tugas

Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian tugas kurang disesuaikan atau dinilai dengan adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa kejelasan dalam

pembagian tugas di tim sudah berjalan dengan baik. Setiap anggota menunjukkan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab mereka dan berhasil melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan setiap aspek program ditangani oleh orang yang tepat.

b. Kejelasan Dalam Tanggung Jawab

Kejelasan dalam tanggung jawab pada program sangat penting untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas. Setiap pihak yang terlibat harus memahami peran dan tugasnya, sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa kejelasan tanggung jawab dalam implementasi program ini telah dilaksanakan dengan baik. Setiap bagian menjalankan tugasnya secara maksimal, mengikuti prosedur yang ditetapkan, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga penyaluran bantuan, sehingga memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada

c. Kejelasan Dalam Wewenang

Kejelasan terhadap wewenang dalam implementasi program sangat krusial untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap individu atau instansi yang terlibat perlu memahami batasan dan tanggung jawabnya, sehingga keputusan dapat diambil secara tepat dan efisien. Hal ini juga mendorong kolaborasi yang baik dan meminimalkan potensi konflik dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa kejelasan wewenang dalam program BLT Dana Desa sudah baik. Setiap aparat memahami wewenang mereka dan melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing. Koordinasi yang baik dengan atasan juga meningkatkan efisiensi kerja, memastikan setiap aspek program ditangani oleh orang yang tepat untuk hasil yang optimal

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Kecamatan Amuntai Selatan (Studi Kasus: Desa Murung Sari dan Desa Mamar)**

Dalam rangka meningkatkan implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Kecamatan Amuntai Selatan (Studi kasus: desa Murung Sari dan Desa Mamar) tidak semulus yang di harapkan dan tentu memiliki hambatan atau kendala yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut dan ada pula faktor yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Kecamatan Amuntai Selatan (Studi Kasus: Desa Murung Sari dan Desa Mamar):

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam Implementasi mengacu pada elemen-elemen yang mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan suatu program, faktor-faktor ini memiliki pengaruh positif dan membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Adanya Kejelasan Dalam Pembagian Tugas

Kejelasan dalam pembagian tugas pada implementasi program sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap individu dapat fokus

pada tugas yang telah ditetapkan, sehingga meminimalkan risiko tumpang tindih pekerjaan dan kebingungan dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa kejelasan dalam pembagian tugas di tim sudah berjalan dengan baik. Setiap anggota menunjukkan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab mereka dan berhasil melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan setiap aspek program ditangani oleh orang yang tepat.

b. Adanya Kejelasan Dalam Tanggungjawab Pada Program

Implementasi program yang sesuai dengan tanggung jawab memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan dengan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan tanggung jawab yang jelas, setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, sehingga menghilangkan potensi tumpang tindih pekerjaan dan kebingungan. Tanggung jawab ini juga membantu meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan, membuat setiap proses berlangsung secara sistematis dan standar. Oleh karena itu, implementasi program yang menggunakan tanggung jawab secara jelas dapat berjalan lebih lancar dan efisien, menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa kejelasan tanggung jawab dalam implementasi program ini telah dilaksanakan dengan baik. Setiap bagian menjalankan tugasnya secara maksimal, mengikuti prosedur yang ditetapkan, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga penyaluran bantuan, sehingga memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada.

c. Adanya Kejelasan Terhadap Wewenang Dalam Program

Kejelasan terhadap wewenang dalam implementasi program sangat krusial untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap individu atau instansi yang terlibat perlu memahami batasan dan tanggung jawabnya, sehingga keputusan dapat diambil secara tepat dan efisien. Hal ini juga mendorong kolaborasi yang baik dan meminimalkan potensi konflik dalam pelaksanaan program.

Dari hasil wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa kejelasan wewenang dalam program BLT Dana Desa sudah baik. Setiap aparat memahami wewenang mereka dan melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing. Koordinasi yang baik dengan atasan juga meningkatkan efisiensi kerja, memastikan setiap aspek program ditangani oleh orang yang tepat untuk hasil yang optimal.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi program mengacu pada bagian – bagian yang menghalangi ataupun menghambat pada keberhasilan suatu program, faktor ini memiliki pengaruh negatif serta menghambat pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Kurangnya sosialisasi dan transparansi informasi yang jelas mengenai BLT

Kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu masalah utama dalam pelaksanaan program ini di berbagai daerah. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kriteria penerima dan prosedur pengajuan, sehingga mereka tidak tahu apakah mereka berhak menerima bantuan tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Murung Sari dan Desa Mamar dapat

disimpulkan bahwa sosialisasi program ini belum berjalan dengan baik. Warga desa mengungkapkan bahwa informasi yang diterima sering kali tidak akurat dan banyak yang hanya mendengar dari mulut ke mulut, yang mengakibatkan kesalahpahaman mengenai program tersebut.

- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana BLT Dana Desa

Kesadaran terhadap pemahaman tentang penggunaan dana bantuan adalah kesadaran seseorang secara penuh secara hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang menerima manfaat tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa manfaat dan penggunaan dana yang dihasilkan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih kurang optimal. Masyarakat belum sepenuhnya memahami kebijakan dan pemanfaatan dana program ini, sehingga mereka kesulitan dalam mengakses manfaat yang tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih memahami isi kebijakan dan dapat memanfaatkan dana BLT dengan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

- c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan BLT Dana Desa

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan BLT ini dapat menyebabkan program tidak bisa berjalan dengan baik, hal ini dapat menjadi penghambat dalam proses keberhasilan program.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat pendidikan rendah di kalangan masyarakat menghambat pemahaman mereka terhadap konsep dan tujuan BLT. Program ini juga lebih fokus pada pencapaian hasil cepat daripada mengatasi akar permasalahan kemiskinan, sehingga dampaknya bersifat sementara. Selain itu, program ini sering dipandang sebagai alat politik, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, perlunya perbaikan dalam sosialisasi dan pendekatan program agar lebih efektif dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

- d. Kurangnya kepatuhan dari sikap responsif terhadap masukan masyarakat.

Kurangnya kepatuhan terhadap sikap responsif terhadap masukan masyarakat dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu tantangan serius yang perlu diatasi. Banyak masyarakat yang merasa suaranya tidak didengar ketika memberikan masukan tentang pelaksanaan program ini, baik terkait dengan penyaluran bantuan, kriteria penerima, maupun mekanisme yang digunakan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masukan dari masyarakat tidak direspons dengan baik, akan sulit untuk mencapai tujuan program BLT, yaitu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk lebih aktif mendengarkan dan merespons umpan balik dari masyarakat agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan harapan publik.

Dari hasil wawancara dan observasi dengan masyarakat Desa Murung Sari, disimpulkan bahwa terdapat masalah dalam transparansi dan responsivitas pemerintah desa terhadap masukan warga. Masyarakat merasa kurang termotivasi untuk memberikan umpan balik karena kurangnya transparansi, serta pemerintah lebih

memprioritaskan kegiatan operasional daripada mendengarkan masukan. Masukan yang diberikan sering dianggap remeh, dan informasi mengenai tindak lanjutnya tidak jelas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.

## **SIMPULAN**

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Efektivitas Program Bina Keluarga Balita di Desa Pondok Babaris Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah peneliti lakukan setidaknya dapat disimpulkan yaitu:

keterbukaan informasi mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Desa Murung Sari dan Desa Mamar masih sangat kurang. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya program ini menunjukkan bahwa informasi yang seharusnya disampaikan kepada penerima manfaat tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan, di mana masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan dari program BLT tersebut. Keterbukaan informasi yang rendah ini berpotensi menghambat efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak warga di kedua desa tersebut yang tidak mengerti cara penggunaan dana BLT. Mereka tampaknya tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai bagaimana dana ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang dan pangan. Ketidapahaman ini menjadi masalah serius, karena dapat menyebabkan dana yang diterima tidak dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, tujuan awal dari program BLT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai secara maksimal.

Observasi juga mengindikasikan bahwa masyarakat di Desa Murung Sari dan Desa Mamar mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan dana BLT. Hal ini terlihat dari tanggapan warga yang menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang mekanisme dan tujuan dari bantuan tersebut. Ketidapahaman ini berpotensi menghambat program bantuan, karena masyarakat tidak sepenuhnya menyadari bagaimana dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan upaya sosialisasi agar informasi mengenai BLT dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Di sisi lain, meskipun ada kekurangan dalam keterbukaan informasi, kejelasan pembagian tugas di antara petugas pelaksana program sudah berjalan dengan baik. Setiap anggota tim menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga proses pelaksanaan program tetap terorganisir. Namun, partisipasi masyarakat dalam mengikuti arahan yang diberikan masih perlu ditingkatkan. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, keberhasilan program akan sulit dicapai.

Kepatuhan terhadap tanggungjawab dalam implementasi program BLT juga menunjukkan hasil yang positif. Semua tahapan, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga penyaluran bantuan, dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara maksimal. Hal ini mencerminkan komitmen dari pihak pelaksana untuk menjalankan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kepatuhan terhadap tanggung jawab saja tidak cukup jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang program tersebut.

Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan sosialisasi mengenai program BLT kepada masyarakat. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui penyuluhan atau pertemuan langsung dengan warga untuk menjelaskan tujuan penggunaan dana BLT secara jelas dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan media komunikasi yang lebih efektif, seperti brosur atau pengumuman melalui media sosial, juga bisa menjadi alternatif untuk menyebarkan informasi.

Penting juga untuk melibatkan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi agar pesan dapat lebih mudah diterima oleh warga. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif dari warga desa. Dengan melibatkan mereka, diharapkan informasi mengenai program BLT dapat tersebar dengan lebih luas dan efektif.

Kesimpulannya, meskipun terdapat kepatuhan terhadap tanggung jawab dan kejelasan pembagian tugas dalam pelaksanaan program BLT, tantangan utama tetap pada keterbukaan informasi dan pemahaman masyarakat. Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan melalui program ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pihak pelaksana dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan dana Bantuan Langsung Tunai.

Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dalam hal sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program BLT benar-benar memberikan manfaat bagi penerima manfaatnya. Hanya dengan cara ini, tujuan akhir dari program bantuan dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Murung Sari dan Desa Mamar secara berkelanjutan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. (2024). *BLT Dana Desa 2024: Panduan Lengkap untuk Mendapatkan Tunjangan Bulanan Rp 300 Ribu!* Retrieved from Digidesa: <https://digitaldesa.id/artikel/blt-dana-desa-2024-panduan-lengkap-untuk-mendapatkan-tunjangan-bulanan-rp-300-ribu>
- Dewi, K. S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik, Prose, Implementasi dan Evaluasi*. Bantul: Samudra Biru.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Briliant.
- Tsania, N., Setiawati, B., & Arfah, S. (2023). *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(4), 726-737.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuandari, W., & Marlina, M. (2021). *Tantangan Akuntabilitas Penyaluran BLT Dana Desa Dalam Darurat Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi*, 5(3), 3025-3040.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo. LING Press - Gorontalo Anggota IKAPI